

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan hal penting bagi kehidupan manusia, diatas tanah manusia mencari nafkah, diatas tanah pula manusia membangun rumah sebagai tempat bernaung dan membangun berbagai bangunan lainnya seperti perkantoran. Tanah juga mengandung berbagai macam kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan manusia.¹

Secara hakiki, makna dan posisi strategis tanah dalam kehidupan masyarakat Indonesia, tidak saja mengandung aspek fisik, tetapi juga aspek sosial, ekonomi, budaya, politik, pertahanan keamanan dan aspek hukum. Tanah bagi masyarakat memiliki makna multidimensional. Dari sisi ekonomi, tanah merupakan sarana produksi yang dapat mendatangkan kesejahteraan. Secara politis tanah dapat menentukan posisi seseorang dalam pengambilan keputusan masyarakat dan sebagai budaya yang dapat menentukan tinggi rendahnya status sosial pemiliknya.²

Tanah dan pembangunan merupakan dua entitas yang tidak dapat dipisahkan. Secara sederhana dikatakan bahwa tidak ada pembangunan tanpa tanah. Pembangunan selalu membutuhkan tapak untuk perwujudan proyek-proyek, baik yang dijalankan oleh instansi dan perusahaan milik pemerintah sendiri, maupun perusahaan milik swasta. Hubungan pembangunan dan tanah bukan hanya

¹ Adrian Sutedi, 2007, Implementasi Prinsip Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 45.

²Husein Alting, 2010, Dinamika Hukum Dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Tanah (Masa Lalu, Kini dan Masa Mendatang), Lembaga Penerbitan Universitas Khairun, Ternate, hal. 6.

melingkupi aspek ekonomi namun juga politik.³ Sebagai alas hidup manusia, tanah dengan sendiri menempatkan posisi yang vital, atas pertimbangan karakternya yang unik sebagai benda yang tak tergantikan, tidak dapat dipindahkan dan tidak dapat direproduksi. Mengingat tanah sebagai salah satu unsur penting dalam pembangunan maka diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menentukan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".

Salah satu arah kebijakan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (selanjutnya disebut GBHN),⁴BabIV, bagian B, menyebutkan mengembangkan kebijakan pertanahan untuk meningkatkan kemanfaatan dan penggunaan tanah secara adil, transparan, dan produktif dengan mengutamakan hak rakyat setempat, termasuk hal ulayat dan masyarakat adat, serta berdasarkan tata ruang wilayah yang serasi dan seimbang.

Lebih lanjut Mengingat ketentuan pasal 10 Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (selanjutnya disebut UUPA) yaitu ayat (1) "Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada dasarnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan". Hal ini ditentukan adanya macam-macam hak atas tanah dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.

³*Op.cit*, hal.2.

⁴Ketetapan MPR No.IV/MPR/1999 Tentang GBHN 1999-2004

Saat ini persoalan pertanahan di Indonesia telah berkembang sebagai salah satu sumber konflik dan sengketa, salah satunya adalah berkaitan dengan eksistensi hak-hak atas tanah. Problematika tuntutan atas tanah terkait dengan kepemilikan dan penguasaan tanah semakin meningkat, meskipun secara kuantitas permasalahan hak atas tanah sangat besar namun cakupan wilayahnya sangat luas dan melibatkan warga masyarakat secara massal dibandingkan dengan kasus pertanahan yang bersifat individual (yang pada umumnya di selesaikan di pengadilan).

Konflik dan sengketa tanah akan semakin menajam apabila penanganan masalah oleh pemerintah dilakukan dengan pendekatan parsial yang bersifat sementara. Sedangkan dampak dari konflik tersebut sering mempengaruhi stabilitas keamanan dan ketertiban di suatu wilayah baik dalam bentuk anarkisme masyarakat, melalui okupasi (penyerobotan, penggarapan bahkan pengrusakan tanah yang dilakukan dan diklaim sebagai tanah oleh masyarakat hukum adat atas tanah-tanah) dimana tanah tersebut telah di kuasai dan di kelola oleh Badan Usaha Swasta maupun Badan Usaha Milik Negara.

Baiknya setiap kegiatan yang ada di dalam kehidupan setiap orang haruslah melindungi HAM yang ia miliki. Hak asasi manusia merupakan standar pencapaian bersama bagi setiap orang dan bangsa (*a common standart achievment for all people and nations*)⁵ dalam menciptakan kesejahteraan yang merupakan tujuan utama dibentuknya sebuah negara. Konsepsi ini memberikan tanggung jawab

⁵Mohammed Bedjaoui, The Difficult Advance of Human Rights Towards Universality, in Universality of Human Rights in a Pluralistic World, dilaporkan oleh Dewan Eropa, 1990. Hal. 45.

kepada negara untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) setiap hak yang melekat dalam diri setiap orang dalam segala aktivitas apapun. Pada awalnya, aktivitas yang syarat pelanggaran HAM di dalamnya adalah aktivitas negara dalam menertibkan rakyat, namun seiring perkembangan zaman muncul pihak lain yang menjadi aktor utama pelanggar HAM di dunia, yakni korporasi yang salah satunya perusahaan.⁶

Keberadaan korporasi di Indonesia memiliki peran yang besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga mempengaruhi setiap aspek kehidupan masyarakat sehari-hari. Korporasi juga menciptakan lapangan pekerjaan, menghasilkan produk barang maupun jasa, dan meningkatkan kesejahteraan bagi karyawan dan para pemegang saham. Namun demikian, di sisi yang lain keberadaan korporasi juga memiliki dampak yang merugikan masyarakat secara luas maupun individu. Pencemaran dan kerusakan lingkungan, produksi barang dan layanan jasa yang merugikan konsumen, pengusuran, konflik sumber daya alam memperlihatkan adanya konflik antara bisnis dan HAM. Seiring dengan menguatnya peran korporasi dalam era globalisasi ekonomi, korporasi juga bertanggung jawab untuk menghormati HAM karena keberadaannya berpotensi melanggar HAM.⁷ Hal inilah yang kurang disadari oleh khalayak luas dan perlu disosialisasikan lebih dalam.

⁶Raziv Barokah, 2016. *Formulasi Adopsi United Nations Business and Human Rights Dalam Good Corporate Governance oleh Perseroan Terbatas DI Indonesia*, Jakarta, diakses pada tanggal 26 November 2017.

⁷<http://elsam.or.id/2017/07/rencana-aksi-nasional-bisnis-dan-ham/>, diakses pada tanggal 8 Desember 17, pukul 10.20.

Fakta bahwa korporasi merugikan masyarakat terutama dalam perolehan hak atas tanah kemudian menjadi salah satu perbincangan masyarakat internasional sehingga melahirkan Prinsip-prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan HAM yang telah mendapatkan dukungan sepenuhnya dari Dewan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut Dewan HAM) PBB pada 2011 merupakan instrumen hukum internasional yang inovatif yang bertujuan untuk menempatkan korporasi sebagai aktor baru untuk mengemban peran dan bertanggung jawab dalam pemajuan HAM.⁸

Prinsip ini dikenal dengan sebutan *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights* (selanjutnya disingkat UNGP). UNGP bukanlah sebuah perjanjian internasional (*treaty*) yang secara hukum mengikat (*legally binding*). Kekuatannya terletak pada kerelaan (*authoritative recommendation*) para pihak untuk melaksanakannya, Pada reputasi dan sanksi moral dan sosial. Kekuatannya juga terletak pada sejauh mana negara/ pemerintah serta perusahaan melaksanakannya.⁹ Dokumen yang lebih dikenal sebagai prinsip *Ruggies* berbasis pada 3 pilar¹⁰, yaitu:

- a. Tanggung jawab negara untuk melindungi HAM dari pelanggaran oleh pihak ketiga, termasuk perusahaan, melalui kebijakan, pengaturan, dan keputusan yang layak. Negara tetap memegang peran utama dalam mencegah pelanggaran HAM.

⁸*Ibid.*

⁹*Guiding Principles on Business and Human Rights, Implementing the United Nations "Protect, Respect, and Remedy" Framework*. UNHRC, 2011. h. iv.

¹⁰John Ruggie. 2011. "Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations "Protect, Respect and Remedy" Framework" (United Nations: New York). Document reference A/HRC/17/31.

- b. Tanggung jawab perusahaan untuk menghormati HAM dimana mensyaratkan adanya aksi yang sungguh-sungguh untuk menghindari pelanggaran HAM oleh pihak lain dan menyelesaikan dampak negatif dari bekerjanya perusahaan tersebut. Perusahaan diharuskan memiliki pernyataan komitmen untuk menghormati HAM, melakukan penilaian atas dampak HAM, serta mengintegrasikan prinsip-prinsip penghormatan HAM dalam proses, fungsi, dan kebijakan internal.
- c. Akses yang luas bagi warga korban pelanggaran HAM untuk memperoleh skema pemulihan efektif, baik secara yudisial maupun non yudisial. Mekanisme pengaduan yang efektif dalam perusahaan wajib disediakan sebagai mekanisme untuk menghormati HAM. Negara harus melakukan langkah dalam yurisdiksi mereka untuk memastikan korban memiliki akses untuk pemulihan efektif melalui cara yudisial, administratif, legislatif, atau cara lainnya.

Hak asasi manusia merupakan standar pencapaian bersama bagi setiap orang dan bangsa (*a common standart achievement for all people and nations*)¹¹ dalam menciptakan kesejahteraan yang merupakan tujuan utama dibentuknya sebuah negara. Konsepsi ini memberikan tanggung jawab kepada negara untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) setiap hak yang melekat dalam diri setiap orang dalam segala aktivitas apapun.

¹¹Mohammed Bedjaoui, The Difficult Advance of Human Rights Towards Universality, in *Universality of Human Rights in a Pluralistic World*, dilaporkan oleh Dewan Eropa, 1990. Hal. 45.

Dalam beberapa kasus pelanggaran HAM yang melibatkan perusahaan di Indonesia, yaitu terkait perolehan hak atas tanah. Salah satunya kasus ini terjadi di Aceh lebih tepatnya di Kabupaten Aceh Singkil terjadi pada Januari tahun 2012. Kabupaten Aceh memiliki luas wilayah 3.578 km² dan terdiri dari 10 kecamatan, 23 mukim, serta 190 gampong (desa). Kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Singkil adalah: Kecamatan Pulau Banyak, Kecamatan Singkil, Kecamatan Simpang Kanan, Kecamatan Kuala Baru, Kecamatan Kota Baharu, Kecamatan Suro, Kecamatan Singkil Utara, Kecamatan Danau Paris, Kecamatan Gunung Meuriah dan Kecamatan Singkohor.¹²

Sebagian besar wilayah yang ada di Kabupaten Aceh Singkil dikuasai oleh para pemilik modal (perusahaan kelapa sawit). Tujuh perusahaan perkebunan kelapa sawit yang masih aktif di sana yang mana ketujuh perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut di atas perusahaan PT Ubertraco hingga kini masih berkonflik dengan masyarakat. Dimana Konflik lahan antara masyarakat dengan PT Ubertraco/Nafasindo yang terjadi di Kabupaten Aceh Singkil memiliki kesamaan dengan konflik-konflik lahan di daerah lainnya di Indonesia. Kesamaan ini didasari dengan persoalan yang dialami, yaitu penelantaran Hak Guna Usaha (HGU) yang berlangsung sekian lama.¹³ Dari data yang ada diatas, penulis mengambil contoh kasus dimana tanah sengketa ini adalah sengketa terkait hak atas tanah pada tanah yang ditelantarkan, yaitu tanah kosong yang diklaim oleh masyarakat akan tetapi digunakan perusahaan untuk operasional keuntungan perusahaan tersebut. Dimana

¹²Zulfikar Arma, <http://www.downtoearth-indonesia.org/id/story/ketika-masyarakat-adat-memperjuangkan-hak-atas-tanahnya>, diakses pada tanggal 8 Desember 17, pukul 22.00 WIB.

¹³*Ibid*

masyarakat tak terima karena seharusnya tanah tersebut digunakan untuk kepentingan umum masyarakat setempat, bukan sewenang-sewenang diolah oleh perusahaan kelapa sawit tersebut.

Bukan hanya di aceh, hal serupa hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia yaitu terjadi di beberapa tempat : Kabupaten Malang, Mojokerto, Kabupaten Blitar, Madura dan sebagainya. Data yang didapat atas segala pelanggaran terkait perolehan hak atas tanah penulis dapatkan melalui informasi Dokumentasi Pelanggaran HAM lembaga Studi dan Adokasi Masyarakat (ELSAM).¹⁴

Lembaga ini merupakan lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) atau *Institute for Policy Research and Advocacy*, sebuah organisasi hak asasi manusia, yang berdiri di Jakarta, sejak Agustus 1993. Tujuannya turut berpartisipasi dalam usaha menumbuhkan kembangkan, memajukan dan melindungi hak-hak sipil dan politik serta hak-hak asasi manusia pada umumnya sebagaimana di amanatkan oleh UUD 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Sejak awal, semangat perjuangan ELSAM adalah membangun tatanan politik demokratis di Indonesia melalui pemberdayaan masyarakat sipil melalui advokasi dan promosi hak asasi manusia.¹⁵

Di Indonesia sendiri pihak negara yang bertanggungjawab dalam problem Hak Asasi Manusia ialah lembaga pelengkap negara yang disebut KOMNAS HAM. Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian,

¹⁴<http://elsam.or.id/id/> , diakses pada taggal 20 Januari 2018, pukul 12.00 WIB.

¹⁵<http://elsam.or.id/tentang-kami/> , diakses pada tanggal 20 Januari 18, pukul 12.10 WIB.

penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.¹⁶ Di sisi lain dari segi sejarah problem tanah ini sudah sangat memprihatinkan, ketegasan dari pemerintah pun tidak jelas. Undang-undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 tahun 1999 pun tidak mampu memperbaiki masalah tanah yang dihadapi masyarakat hingga saat ini. Istilah yang kaya makin kaya ini semakin menjadi penghantar kenikmatan yang tak ada hentinya. Hadirya UNGP ini pun memberikan pandangan bahwasanya prinsip ini mampu untuk memberikan masukan kepada ketiga pihak yaitu Negara, Perusahaan dan Masyarakat.

Sebelum memasuki ranah perusahaan dan ranah masyarakat, problem tanah yang semakin rumit ini kenapa tidak diselesaikan terlebih dahulu oleh negara. Seharusnya pemerintah dapat memberikan perlindungan yang memadai dan tegas terhadap pelaku yang terbukti salah dan memprioritaskan masyarakat. Terhadap data yang telah dipaparkan diatas, terdapat sejumlah hak dasar warga yang dilanggar, diantaranya hak atas kesejahteraan, hak kepemilik atas tanah, hak memperoleh ganti rugi, hak bertempat tinggal serta berkehidupan layak, jaminan social, hak atas pekerjaan, hak atas kesehatan, hak atas lingkungan, dan hak masyarakat adat itu sendiri.¹⁷

Keberagam konflik dan perkara pertanahan sepertinya tidak pernah surut, bahkan cenderung terus meningkat baik intensitas maupun keragamannya, seiring dengan semakin sulitnya akses untuk memiliki tanah dan bertambahnya

¹⁶<https://www.komnasham.go.id/index.php/about/1/tentang-komnas-ham.html>, diakses pada tanggal 14 Maret 2018, pukul 12.00 WIB.

¹⁷Mulyana Asep, SIP 2014. "*Bisnisdan HAM: Menurunkan Prinsip Menjadi Praktik*" (paper dalam Pointers yang dibuat oleh saudara Asep Mulyana dalam Nasional Komnas HAM, merupakan arsip koleksi pusat dokumentasi ELSAM)

kesenjangan posisi tawar-menawar antara ketiga aktor pembangunan yakni pemerintah, korporasi dan masyarakat untuk memperoleh hak atas tanah. Serta perlunya perbaikan sistem tanah oleh negara melalui perundang-undangan. Maka penulis memfokuskan pilar pertama UNGP yaitu aktor negara sebagai arah perbaikan yang diharapkan bisa menjangkau aktor kedua dan ketiga yaitu Perusahaan investasi dan masyarakat.

Ditambah penghormatan HAM merupakan pilar konstitusi yang tidak dapat ditawar, maka menerapkan UNGP pilar pertama terlebih dahulu sebagai arah perbaikan yang seimbang dan adil dalam memberikan perlindungan hak-hak masyarakat dalam pengaturan perolehan hak atas tanah oleh korporasi di Indonesia dirasa penting tidak hanya sebagai tuntutan bagi perusahaan untuk menghormati hak asasi, juga sebagai daya tawar di dunia internasional.

Atas dasar latar belakang masalah itulah penulis tertarik untuk menjawab permasalahan tersebut dalam skripsi yang berjudul “Urgensi Penerapan Prinsip Pilar Pertama *United Nations Guiding Principles On Bussines And Human Rights* (UNGP) dalam Pengaturan Perolehan Hak Atas Tanah oleh Korporasi di Indonesia”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam suatu penelitian merupakan hal yang penting agar dalam penelitian dapat lebih terarah dan terperinci sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Berdasarkan uraian dari latar belakang, adapun perumusan permasalahan yang hendak dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Analisis tanggung jawab negara dalam menerbitkan regulasi yang memenuhi keadilan serta keseimbangan menurut prinsip UNGP dalam pengaturan perolehan hak atas tanah oleh korporasi di Indonesia ?
2. Bagaimana urgensi penerapan prinsip pilar pertama *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights* (UNGPR) diterapkan dalam pengaturan perolehan hak atas tanah yang memenuhi keseimbangan dan keadilan kepentingan negara, korporasi dan masyarakat ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan menggali lagi mengenai pemahaman dan urgensi penerapan UNGP apabila diterapkan secara tegas di Indonesia, maka penelitian ini ditujukan :

1. Untuk memahami bentuk tanggung jawab negara dalam menerbitkan regulasi yang memenuhi keadilan serta keseimbangan antar para pihak dalam pengaturan perolehan hak atas tanah oleh korporasi di Indonesia.
2. Untuk memahami urgensi penerapan pilar pertama *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights* (UNGPR) diterapkan dalam pengaturan perolehan hak atas tanah yang memenuhi keseimbangan dan keadilan kepentingan negara, korporasi dan masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan menggali lagi mengenai pemahaman dan urgensi penerapan UNGP apabila diterapkan secara tegas di Indonesia, maka manfaat dari penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Bagi mahasiswa memberikan tambahan pengetahuan tentang konsep UNGP dimana prinsip-prinsip yang terkandung didalamnya dapat menghasilkan pengaturan yang lebih baik sehingga dirasa penting untuk diterapkan ke dalam sebuah peraturan terutama dalam pengaturan perolehan hak atas tanah oleh korporasi. Selanjutnya agar dapat diterapkan oleh negara maka negara harus mengesahkan Rancangan Aksi Nasional terkait HAM dalam hukum bisnis, hal ini menjadi pandangan baru yang mana diharapkan agar perusahaan lebih menghormati HAM. Rancangan Aksi bisnis dan HAM semoga dapat diterapkan menjadi regulasi dalam tatanan hukum di Indonesia.
2. Bagi penegak hukum, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan serta pandangan bahwasanya seiring dengan semakin sulitnya akses untuk memiliki tanah dan bertambahnya kesenjangan posisi tawar-menawar antara ketiga aktor pembangunan yakni pemerintah, swasta dan masyarakat untuk memperoleh hak atas tanah. Maka sangat dirasa *urgent* untuk menerapkan UNGP sebagai suatu upaya memberikan perlindungan yang seharusnya serta mengatur batasan hak apa saja yang dapat dicapai oleh ketiga aktor dalam dunia bisnis di Indonesia. Sehingga dapat memajukan perekonomian dalam negeri maupun luar negeri.
3. Bagi penulis, penelitian ini selain dapat memberikan wawasan penulis terkait urgensi penerapan UNGP dalam pengaturan perolehan hak atas tanah oleh korporasi di Indonesia yang mana sangat dirasa penting melihat fakta dilapangan sering terjadi pelanggaran. Serta sebagai syarat bagi penulis

untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

4. Bagi Masyarakat diharapkan dengan adanya skripsi ini dapat membantu menambah pengetahuan sekaligus dapat membuka pandangan masyarakat bahwa Negara seharusnya bisa lebih meningkatkan perlindungan HAM baik dari segala aspek termaksud pada sektor agraria. Bukan hanya itu agar masyarakat juga ikut mengawasi dan ikut mengawal gerak Negara dalam aspek perolehan hak atas tanah oleh korporasi.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih pemikiran dan solusi mengenai konsep UNGP, Sehingga dapat memberikan kepastian dan rasa aman kepada masyarakat terutama dalam perolehan hak atas tanah oleh korporasi di Indonesia, kemudian dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan hukum di Indonesia. Serta menjadi sumbangsih pemikiran bagi kalangan praktisi maupun pelaku kekuasaan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya di Indonesia. Khususnya, hal ini menjadi sangat penting dalam menerapkan prinsip-prinsip UNGP oleh negara, perusahaan dan masyarakat terkait pengaturan perolehan hak atas tanah yang menjadi titik fokus dalam tulisan ini, kemudian diharapkan menjadi suatu pertimbangan obyektif dan wacana perbaikan kualitas hukum bisnis di Indonesia.

F. Metode Penulisan

1. Metode Pendekatan

Pendekatan di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Menurut Peter Mahmud Marzuki¹⁸ “dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya”. Berdasarkan ruang lingkup dan indentifikasi masalah yang telah diuraikan, maka metode pendekatan yang diambil ialah metode hukum yuridis normative. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁹

Selain itu penulis juga menggunakan pendekatan yang seringkali digunakan dalam penelitian normatif adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) pendekatan ini dilakukan penulis merujuk pada prinsip-prinsip hukum dan regulasi hukum yang ada.

2. Jenis Bahan Hukum

Dalam proses penyusunan penelitian ini penulis menggunakan 3 (tiga) jenis bahan hukum yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad²⁰ ”bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana. Hlm 133.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum. Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm 157

hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu”. Bahan-bahan hukum primer ini terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 33 ayat (3) UUPA Nomor 5 Tahun 1960;
- 2) Undang-undang Hak Asasi Manusia (HAM) Nomor 39 Tahun 1999;
- 3) Perkom Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM;
- 4) Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia RANHAM tahun 2015-2019;
- 5) *The United Nations Guiding Principles on Bussines and Human Rights* (UNGP);
- 6) Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960;
- 7) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
- 8) Undang-undang Tentang Perseroan Terbatas Nomor 12 Tahun 2012.
- 9) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing;
- 10) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdt).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa Buku-buku Hukum, Jurnal-jurnal Hukum, Karya Tulis Hukum atau Pandangan Ahli Hukum yang termuat dalam media massa yang relevan dengan pokok bahasan penulisan hukum ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier juga merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan-penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier berupa Kamus dan Ensiklopedia Hukum dan lain-lain. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah studi dokumen, studi kepustakaan (*library research*) dan studi internet, yang dimaksud adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.²¹ Penulisannya sendiri akan didasarkan pada data-data yang dijadikan obyek penelitian, seperti buku-buku pustaka, artikel ilmiah internet, majalah, surat kabar dan buletin tentang segala permasalahan yang relevan dengan penelitian hukum ini.

3. Analisa Bahan Hukum

Tahap analisa bahan hukum yaitu menguraikan bahan hukum dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sedangkan analisa yang digunakan dalam penelitian

²¹*Ibid.* Hlm. 392

ini dengan cara menganalisa permasalahan dengan konsep dan bahan hukum kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah sebuah cara/upaya lebih untuk menekunkan pada aspek pemahaman secara mendalam pada suatu permasalahan. Penelitian kualitatif adalah penelitian riset yang bersifat deskripsi, cenderung menggunakan analisis dan lebih menonjolkan proses makna.²² Kemudian dibantu dengan interpretasi hukum sebagai alat membedah daripada analisa yang akan penulis gunakan pada pembahasan.

Tujuan dari metode ini adalah pemahaman secara luas dan mendalam terhadap suatu permasalahan secara mendalam pada suatu permasalahan yang sedang dikaji atau akan di kaji. Bahan hukum selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi. Hasil analisa bahan hukum akan diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi (a) sistematis; (b) gramatikal; (c) teleologis.²³ Serta data yang dikumpulkan lebih banyak huruf, kata ataupun gambar dari pada angka. Sehingga akan muncul solusi dari permasalahan hukum yang ada.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab yang tersusun secara sistematis. Dimulai dari Bab I sampai dengan Bab IV yang diuraikan sebagai berikut:

²²Nanang Budi Utomo, <https://bukubiruku.com/metode-penelitian-kualitatif/>, 2016. Diakses pada tanggal 8 Desember 2017, pukul 23.00 WIB.

²³Interpretasi dibedakan menjadi interpretasi berdasarkan kata-kata undang-undang (leterlijk), interpretasi gramatikal, interpretasi berdasarkan kehendak pembentuk undang-undang, interpretasi sistematis, interpretasi historis, interpretasi sosiologis, interpretasi sosio-historis, interpretasi filosofis, interpretasi teleologis, interpretasi holistik dan interpretasi holistik tematis-sistematis. Lihat Jimly Asshiddiqie. 1997, *Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*. Jakarta: Ind. Hill.Co Hal. 17-18

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan latar belakang, yakni memuat landasan yang bersifat ideal *das sollen* dan kenyataan *das sein* yang melatar belakangi suatu masalah yang hendak dikaji lebih mendalam. Rumusan masalah yang diturunkan dari latar belakang memuat suatu masalah yang akan diangkat dan dibahas. Adapun selanjutnya tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan, metode dan sistematika penelitian untuk mempermudah penyusunan penulisan hukum ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tentang pemaparan kajian-kajian teoritik antara lain berkaitan dengan permasalahan yang akan ditulis, yang mana nanti akan dijadikan landasan analisis hukum penulisan di bab selanjutnya yakni Bab III pembahasan, dalam hal ini penulis memilih kerangka teori dan konseptual mengenai: (1) UNGP; (2) Korporasi; (3) Pengaturan Perolehan Hak Atas Tanah.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab III ini berisi mengenai hasil daripada penelitian yang telah dikaji dan dianalisis serta sistematis berdasarkan pada kajian pustaka sebagaimana dalam Bab II.

BAB IV : PENUTUP

Bab IV ini merupakan bab terakhir dalam penulisan ini yang berisikan kesimpulan dari pembahasan Bab III, dan berisikan saran atau rekomendasi penulis terhadap permasalahan yang diteliti.